

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DAN KONFLIK SOSIAL YANG DITIMBULKAN DI ERA PANDEMI COVID-19

¹ Muliawati, ² Novita Sari

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

Email: muliawati@unsyiah.ac.id

Aceh - Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to help us understand and examine the process of allocating Cash Direct Assistance from village funds, maps of social conflicts and mitigation efforts against conflicts that occur in Seumadam village, Vocational Muda District. This study uses a qualitative descriptive research method. The results showed that the data collection process, determination, method and mechanism for distributing BLT-DD Kampung Seumadam had been carried out in accordance with existing regulations. Social conflicts caused by the distribution of BLT-Dana Desa Seumadam Village occurred vertically and horizontally. vertical conflicts occur between the Village Government and the community, while horizontal conflicts occur between the Seumadam village community itself. The causes of the conflict occurred, among others, due to the absorption of community aspirations that had not been maximized in the distribution of BLT-Village Funds and the absence of socialization carried out by the village government regarding the process or mechanism for distributing BLT-Village Funds. Mitigation efforts against conflicts that occur are carried out through a process of deliberation and socialization of the assistance program carried out by the village.

Keywords: Cash direct assistance; Social Conflict; Village Fund

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu kita memahami dan mengkaji proses pengalokasian Bantuan Langsung Tunai dari dana desa, peta konflik sosial dan upaya mitigasi terhadap konflik yang terjadi di desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pendataan, penetapan, metode dan mekanisme penyaluran BLT-DD Kampung Seumadam sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Konflik sosial yang disebabkan oleh penyaluran BLT- Dana Desa Kampung Seumadam terjadi secara vertikal dan horizontal. konflik vertikal terjadi antara Pemerintah Desa dan masyarakat, sedangkan konflik horizontal terjadi antara masyarakat desa Seumadam itu sendiri. Penyebab konflik tersebut terjadi diantaranya disebabkan oleh daya serap aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam penyaluran BLT-Dana Desa dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah desa terhadap proses atau mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa. Upaya mitigasi terhadap konflik yang terjadi dilakukan melalui proses musyawarah dan sosialisasi terhadap program bantuan tersebut yang dilakukan oleh pihak desa.

Kata Kunci: Bantuan langsung tunai; Dana Desa; Konflik Sosial

PENDAHULUAN

Dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Penerapan pembatasan kegiatan ekonomi telah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah merancang beberapa program perlindungan sosial bagi masyarakat. Salah satunya berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini diatur dalam Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tentang perubahan atas Permen Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa (Kampung). Bantuan yang bersumber dari anggaran dana desa ini diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja (Kemendes PDTT, BAPPENAS, 2020).

BLT-Dana Desa yang disalurkan pemerintah tersebut nyatanya telah berdampak pada munculnya berbagai macam permasalahan sosial di tengah masyarakat. Salah satunya adalah menyangkut dengan permasalahan data yang mengakibatkan munculnya kecemburuan sosial di masyarakat dan menyebabkan munculnya gesekan atau konflik sosial antara pemerintah Desa dan masyarakat itu sendiri (Kominfo BPKP, 2020). Kondisi ini juga terjadi di desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang yang dibuktikan dengan adanya masyarakat yang melakukan protes terhadap penyaluran BLT-Dana Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat Kampung Seumadam tersebut bahwa:

"...saya pernah melakukan protes kepada pihak desa terkait BLT dana Desa, saya juga terdampak dari Covid ini. Saya kesulitan membiayai kehidupan keluarga saya. Tetapi saya gak dapat BLT itu. Saya juga melihat di desa saya lebih sedikit yang mendapatkan BLT itu, sementara desa tetangga saya lebih banyak yang dapat" (wawancara, 4 maret 2021).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasi. Kesejahteraan Kampung Seumadam yang menyatakan bahwa:

"...banyak warga yang datangin keuchik maupun Kaur Kampung untuk menanyakan masalah BLT ini, semua yang datang untuk protes bahwa mereka berhak untuk dapat. Seperti desa tetangga sebelah juga lebih banyak k yang dapat. Mereka terkadang sampai menganggap pihak pemerintah kampung sudah tidak adil dan berlaku korup" (wawancara, 4 maret 2021)

Kondisi ini mengindikasikan adanya gesekan atau konflik sosial yang muncul akibat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dimana konflik tersebut tentunya akan berdampak buruk bagi pemerintahan di tingkat desa. Untuk itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana proses penyaluran BLT-Dana Desa dan bagaimana peta konflik sosial dan upaya mitigasi terhadap konflik yang terjadi di desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dilakukan secara alami sesuai dengan kondisi di lapangan tanpa adanya manipulasi (Arifin, 2012). Dengan Pendekatan ini mampu menghasilkan data-data deskriptif dari setiap individu dan perilaku yang diamati (Moleong, 2010).

Data utama dan data pendukung diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris kampung Seumadam, Bendahara Kampung Seumadam, Kasi. Kesejahteraan Kampung Seumadam dan warga kampung Seumadam (6 orang). Sedangkan data sekunder lainnya diperoleh melalui data-data (dokumen) berupa laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Lokasi penelitian berfokus di desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi mengacu pada desa yang mengalami konflik sosial akibat penyaluran BLT-Dana Desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa) yang menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat telah direalisasikan di seluruh desa di Indonesia, tidak terkecuali di desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan tersebut telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, terutama menyangkut hubungan masyarakat dengan pemerintah Desa, dan juga hubungan sesama masyarakat itu sendiri. Hubungan-hubungan yang timbul bisa berdampak positif maupun negatif, hal ini sangat tergantung pada bagaimana pemerintah di tingkat Desa dapat mengelola Bantuan tersebut sehingga dapat tepat sasaran.

Proses Pendataan, Penetapan, Metode dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kampung Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda

Proses pendataan, penetapan, metode dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Kampung Seumadam dilakukan dengan berpedoman pada Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa, serta Surat Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April Perihal

Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

Pendataan, di kampung Seumadam pendataan dilakukan oleh masing-masing kepala dusun dengan sasaran penerima bantuan keluarga miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan lainnya seperti PKH/BPNT/ memiliki Kartu Prakerja, yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, dan memiliki anggota keluarga yang sakit parah. Kepala dusun dalam hal melakukan pendataan akan memilih keluarga yang paling miskin diantara yang miskin. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran bantuan tersebut, sesuai dengan yang diungkapkan oleh salah satu kepala dusun:

"kita data semua masyarakat miskin, kemudian akan kita seleksi siapa yang paling miskin dan paling berhak mendapatkan bantuan ini, karena kan memang gak semua masyarakat miskin bisa dapat. Kita juga punya kuota berapa yang bisa dapat sesuai dengan anggaran yang ada" (wawancara, 3 April 2021)

Penetapan, untuk proses validasi, finalisasi dan penetapan keluarga yang akan menerima bantuan dilakukan dalam musyawarah tingkat Desa. Musyawarah tingkat desa ini dihadiri oleh masing-masing kepala dusun, perangkat desa, dan majelis duduk sekitar kampung. Legalitas dokumen penetapan KK calon penerima BLT- Dana Desa tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa, dilaporkan dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya, data penerima bantuan ini dipublikasikan dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman Desa agar dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Desa seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Kampung Seumadam:

"....awalnya didata oleh kepala dusun, kemudian dibahas bersama dalam musyawarah desa untuk disepakati Bersama. Baru kemudian dokumen tersebut ditandatangani oleh Datok (Kepala Desa), baru kemudian disahkan ke Kecamatan. Kita juga tempelkan daftar nama penerimanya di papan pengumuman Kampung" (wawancara, 3 April 2021)

Jumlah KK yang menerima BLT sudah disesuaikan dengan besaran anggaran Desa Kampung Seumadam tersebut. Jumlah KK daftar penerima BLT- Dana Desa Kampung Seumadam tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Penerima BLT- Dana Desa Kampung Seumadam Tahun 2020

No	Jumlah KK	Bulan	Satuan	Jumlah
1	160	April	600.000	96.000.000
2	156	Mei	600.000	93.600.000
3	156	Juni	600.000	93.600.000
4	156	Juli	300.000	46.800.000
6	156	Agustus	300.000	46.800.000
7	156	September	300.000	46.800.000
Jumlah				423.600.000

Sumber: diolah dari data Desa 2020

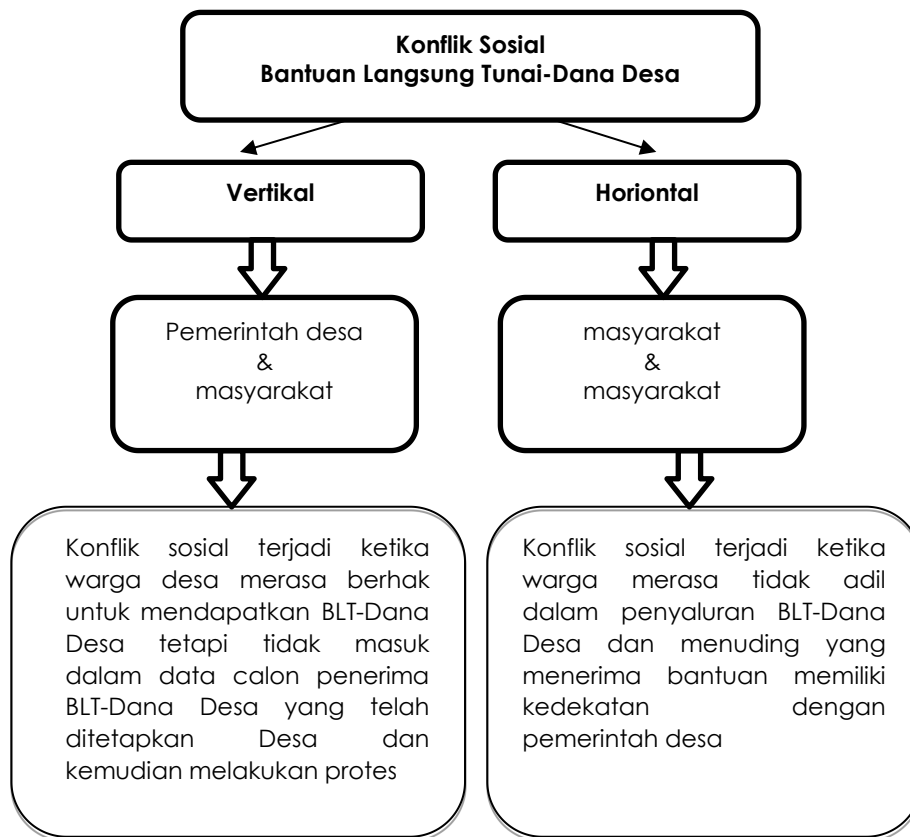
Metode dan Mekanisme Penyaluran, metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat dilakukan dengan menyesuaikan jumlah anggaran yang ada di Kampung Seumadam. Jumlah dana yang diterima masing-masing KK di Kampung Seumadam berjumlah Rp.300.000 untuk 3 bulan pertama dan Rp.600.000 untuk 3 bulan berikutnya. Sedangkan untuk mekanisme penyalurannya dilakukan oleh Pemerintah Desa secara tunai.

Konflik Sosial Akibat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat data pandemk Covid-19. Program bantuan ini juga dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi corona. Namun dalam proses pelaksanaannya, program ini juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Salah satunya ditandai dengan munculnya konflik sosial ditengah masyarakat.

Menurut Francis dan Tamoya dalam (Adis Imam Munandar, 2019), Konflik adalah pertentangan antar individu, antar kelompok ataupun antara individu dan kelompok. Sementara dalam kehidupan sosial, konflik sendiri adalah benturan kepentingan, keinginan, pendapat, atau lainnya yang didalamnya setidaknya melibatkan dua belah pihak atau lebih (Elly M. Setiadi, Usman Kolip, 2015). Karna dalam kehidupan bermasyarakat konflik tidak bisa dihindari, maka penting untuk diketahui dalam bentuk apa konflik itu terjadi, bertentangan tajam atau hanya sekadar perbedaan pandangan (Suwandi Sumartias dan Agus Rahmat, 2013). Hal ini tentunya akan sangat menentukan bagaimana upaya mitigasi terhadap konflik itu dapat dilakukan.

BLT- Dana Desa adalah suatu permasalahan yang diperselisihkan antara masyarakat dan pemerintah Desa. Meskipun konflik yang terjadi disini hanya perbedaan pandangan, tentunya ini juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Konflik BLT-Dana Desa yang terjadi di desa Seumadam ini terjadi dalam dua bentuk, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara penguasa dengan masyarakat, sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar sesama masyarakat itu sendiri (Roger, 2012). Konflik vertikal disini terjadi antara pemerintah kampung Seumadam dan masyarakat. Sedangkan konflik horizontal dalam hal ini terjadi diantara masyarakat Kampung Seumadam seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Konflik Sosial BLT-Dana Desa Kampung Seumadam

Penyebab konflik vertikal dan horizontal penyaluran BLT-Dana Desa tersebut yaitu, **pertama**, karena daya serap aspirasi masyarakat yang belum maksimal dalam penyaluran bantuan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori yang mengemukakan bahwa potensi konflik vertikal dan horizontal disebabkan oleh saluran untuk menyampaikan pendapat tidak memadai, adanya keluhan (aspirasi) yang ada tidak didengar; ketakutan masyarakat akan terjadinya ketidakadilan (Fisher, S., Abdi D.I., Ludin, J.Williams, & S.Williams,S, 2000).

Pemerintahan Kampung Seumadam sangat menyadari bahwa penyerapan aspirasi warga penting untuk dilakukan. Akan tetapi, pemerintah kampung Seumadam juga harus memperhatikan dan memenuhi peraturan yang ada, dimana didalam peraturan diatur terkait persentase jumlah anggaran dana desa yang bisa dipakai untuk program BLT-Dana Desa ini. Besar kecilnya jumlah penerima BLT-Dana Desa ini sangat dipengaruhi oleh besaran anggaran dan jumlah penduduk miskin di desa masing-masing. Kondisi ini berdampak pada masih adanya aspirasi masyarakat yang belum dapat diserap oleh perangkat desa dan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Desa Kampung Seumadam:

“...sambil mendengarkan aspirasi/keluhan masyarakat, kami juga harus mempertimbangkan peraturan yang ada. Gak mungkin juga semua aspirasi masyarakat dapat kami tampung, anggaran kita juga terbatas, jadi wajar kalau masih ada masyarakat yang kecewa ” (wawancara, 3 April 2021)

Adanya perbedaan jumlah KK calon penerima bantuan pada setiap Desa tersebut juga telah menyebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam menyalurkan BLT-DD dan menganggap pemerintah desa telah bertindak koruptif, sebagaimana diungkapkan oleh Kasi. Kesejahteraan Kampung Seumadam, bahwa:

“...memang benar, ada masyarakat-masyarakat yang protes, mengapa di desa kita sedikit sekali jumlah KK yang mendapatkan bantuan tersebut, padahal desa tetangga lebih banyak KK dapat. Banyak dari mereka tidak paham bahwa ini sangat dipegaruhi oleh jumlah masyarakat dalam kampung tersebut dan jumlah anggaran dana desa yang ada di tiap-tiap desa berbeda-beda. Sehingga kita seringkali dianggap sudah bertindak koruptif dan sering dianggap tidak adil dalam memberikan bantuan”. (wawancara, 3 Maret 2021)

Kondisi diatas juga sejalan dengan yang disampaikan (Bakri, 2015) bahwa awal mula dari timbulnya konflik itu sendiri adalah karena adanya interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang didalamnya terjadi perebutan sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan, yang pada dasarnya jumlah ketersediannya juga terbatas.

Kedua, tidak adanya sosialisasi pemerintah desa terhadap proses atau mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa tersebut, sehingga banyak masyarakat yang salah paham terhadap perangkat desa sebagaimana yang diungkapkan masyarakat desa Seumadam bahwa:

“...pemerintah kampung tidak melakukan sosialisasi terkait bantuan tersebut, masyarakat tidak tahu apa-apa terkait penyaluran bantuan itu sudah ada aturan terkait besaran dananya. Sehingga kami menganggap bahwa kami juga berhak mendapatkan bantuan itu. Saya bingung dengan penentuan calon penerimanya, saya juga terdampak Covid, tapi gak dapat, sedangkan tetangga saya yang sama dengan saya tapi malah dapat.” (wawancara, 2 April 2021)

Kondisi ini mengakibatkan adanya prasangka buruk yang timbul dalam hubungan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri maupun antara masyarakat terhadap perangkat desa, dimana hal ini yang menjadi penyebab munculnya kecemburuan sosial dan berujung pada tuduhan-tuduhan palsu yang muncul di tengah masyarakat seperti menganggap bahwa penerima bantuan tersebut memiliki kedekatan (kekeluargaan maupun hubungan emosional lainnya) dengan pihak Pemerintah Kampung.

Program BLT -Dana Desa ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelayanan publik pemerintah desa/Kampung terhadap masyarakat. Program BLT-Dana Desa sendiri dilakukan dengan tujuan sebagai jaring pengaman sosial yang dapat melindungi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh

(McKevitt, 1998) bahwa tujuan dilakukannya pelayanan publik itu sendiri, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberi pelayanan pendidikan, kesehatan, kemananan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, jika kebijakan ini tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat maka akan berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti halnya yang terjadi di Kampung Seumadam.

Upaya Mitigasi Konflik Sosial yang terjadi di Kampung Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda

Konflik sosial yang terjadi akibat penyaluran BLT-Dana Desa perlu untuk diselesaikan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Seumadam diantaranya adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait proses pendataan, penetapan, metode dan mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa. Masyarakat yang melakukan aksi protes akan diberikan pemahaman terkait bantuan tersebut, sehingga efek yang timbul tidak bertambah buruk dan konflik dapat teratasi sebagaimana yang disampaikan sekretaris Desa Seumadam bahwa:

“...selama ini setiap ada yang datang untuk protes, masyarakat kita berikan pemahaman terkait dengan bagaimana sebenarnya data penerima bantuan itu ditetapkan. Kita juga menjelaskan bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk mengatasi permasalahan semua keluarga. Kita mensiasatinya dengan memilih keluarga yang paling miskin diantara yang miskin” (wawancara, 3 April 2021)

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ini nyatanya telah mampu meredam potensi terjadinya konflik yang lebih buruk. Upaya ini juga dianggap efektif dikarenakan kondisi konflik yang sedang timbul saat ini hanya berupa perbedaan pandangan dan belum terlalu tajam, sehingga masih dapat teratasi dengan upaya tersebut.

KESIMPULAN

Konflik sosial yang terjadi dalam penyaluran BLT-Dana Desa telah merusak tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan program bantuan tersebut. Harapan pemerintah agar bantuan tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat, justru telah menyebabkan munculnya konflik ditengah masyarakat. Untuk itu, perlu adanya kesiapan dan kemampuan dari pemerintah desa untuk dapat mengelola dan mendistribusikan setiap program bantuan sosial yang diberikan pemerintah secara adil dan tepat agar tidak menimbulkan konflik dan merugikan pemerintah desa dan masyarakat.

REFERENSI

- Adis Imam Munandar, m. L. (2019). kebijakan dana Desa dan Konflik Sosial: studi Kasus di Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 106-124
- Andayani, T. d. (2020). *Pengantar Sosiologi*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. *The Politics*, 1 (1)
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. (2015). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Fisher, S., Abdi D.I., Ludin, J. Williams, & S. Williams, S. (2000). *Working with Conflict: Skill and Strategies for Action*. Brimingham: Zed Books
- Francis, T. (2013). Rural Migration and Land Conflict: Implications on Agricultural Productivity in Uganda. *National Graduate Institute for Policy Studies Gripis*, 13-17
- Kemendes PDTT, BAPPENAS. (2020). *Buku Panduan Pendataan Penerima BLT-Dana Desa*. Jakarta: KOMPAK
- Kominfo BPKP. (2020, Oktober 21). www.bpkp.go.id. Retrieved from www.bpkp.go.id: <http://www.bpkp.go.id/berita/read/26661/0/BPKP-Sebutkan-Masalah-Data-Penyialuran-BLT-Dana-Desa>
- Kominfo BPKP. (2020, Oktober 21). www.bpkp.go.id. Retrieved Maret 1, 2021, from www.bpkp.go.id: <http://www.bpkp.go.id/berita/read/26661/0/BPKP-Sebutkan-Masalah-Data-Penyialuran-BLT-Dana-Desa>
- McKevitt, D. (1998). *Managing Core Public Services*. United States: Blockwell Publisher
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nasir, M. (2005). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Roger, J. V. (2012). Understanding Propensity to Initiate Negotiations: An examination of the Effects of Culture and Personality. *International Journal Of Conflict Management*, 23(3):266-289
- Suwandi Sumartias dan Agus Rahmat. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Konflik Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 13-20